

ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Galih Pramilu Bakti, Johanna Maria Kodoatie¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Fiscal decentralization has been adopted worldwide. The common motive of many countries adopted fiscal decentralization because it potentially improve performance of the public sector. Since the "UU No. 22/ 1999" and "UU No 25/1999" released and revised by "UU No 32/2004" and "UU No 33/2004" it have impact local government in Indonesia, because they have role to decide local government finance. It also assumed that local government improving public services for women. That measured by women access to education sector. This paper use panel data which analyze with Fixed Effect Methods model. Data series on local goverments of Daerah Istimewa Yogyakarta is contructed for the years 2004-2009. The variabel is local revenue, government expenditure, population, per capita income, amount of highschool. Finding suggest that fiscal decentralization which analyze with Fixed Effect Methods Model does not have significant influence to women education access in Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Fixed Effect Methods, Gender, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir desentralisasi fiskal diterapkan di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, desentralisasi pengambilan kebijakan fiskal dan administrasi publik di negara-negara Amerika Latin, dan reformasi ekonomi dari sentralistik menjadi desentralisasi di negara-negara Asia. Bird dan Vaillancourt dalam Kwon (2003) mengemukakan beberapa argumen mengapa desentralisasi fiskal banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena desentralisasi fiskal diyakini mampu meningkatkan kinerja sektor publik. Oates (1999) dalam teori *Fiscal Federalism* menyatakan bahwa penentuan barang publik dengan desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya. Alasannya adalah: 1) pemerintah daerah dapat menyesuaikan letak geografis yang tepat bagi barang publik di daerah 2) pemerintah daerah mempunyai posisi yang lebih baik dalam mengenal pilihan dan kebutuhan daerah 3) tekanan dari persaingan antar wilayah akan memotivasi pemerintah daerah untuk inovatif dan akuntabel kepada penduduknya.

Sejak Januari 2001, Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua peraturan tersebut kemudian disempurnakan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Desentralisasi diharapkan membuat *outcome* pembangunan lebih positif. Pada kebanyakan negara berkembang, desentralisasi berproses secara relatif dalam tahap yang mulai timbul. Bukti bagaimana perempuan terdampak oleh kebijakan desentralisasi mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan yang signifikan di tingkat daerah. Pada tingkat daerah, kebanyakan layanan yang disediakan adalah *quasi public goods* –barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan dan dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah (Guritno; 2001). Pada kondisi tersebut, penting untuk mengalokasikan sumber daya secara hati-hati untuk memastikan akses layanan publik pada *disadvantages group* yang dimana perempuan termasuk di dalamnya. Bagaimanapun juga, sejak dimungkinkannya identifikasi

¹ Penulis penanggung jawab

keuntungan layanan publik pada kebanyakan kasus. Kepekaan gender penting untuk memastikan alokasi sumberdaya yang adil. Indonesia sendiri memulai perhatian dan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Hasil monitoring UNDP terhadap pencapaian MDGs pada program mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2007 menunjukkan beberapa hasil. Di bidang pendidikan, kemajuan yang terjadi dalam kesetaraan gender secara keseluruhan cukup berarti.

Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun dari 2004-2009 di kabupaten/kota provinsi DIY cenderung fluktuatif setiap tahunnya dan tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Daerah yang mempunyai angka melek huruf paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Gunungkidul adalah daerah yang memiliki angka melek huruf paling rendah di antara kabupaten/kota yang lain di provinsi DIY. Secara umum di Provinsi DIY Angka Melek Huruf cukup tinggi, pada tahun 2004 untuk 100 orang laki-laki yang ada di Provinsi DIY mampu membaca dan menulis sebanyak 91,9 persen, sebaliknya untuk perempuan setiap 100 orang yang mampu membaca dan menulis sebanyak 79,9 persen. Walaupun secara umum AMH di kota/kabupaten dinyatakan baik, akan tetapi nampak bahwa Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki kemungkinan bagi setiap perempuan untuk menikmati fasilitas pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah jauh lebih baik dan berkualitas.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Desentralisasi fiskal dianggap sebagai alat untuk mendekatkan pengambilan kebijakan penyediaan barang publik agar lebih efisien dan sesuai dengan permintaan masyarakat diharapkan mampu membuka akses barang publik bagi perempuan. Di Indonesia desentralisasi fiskal tercermin dalam kebijakan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan indikator yang digunakan oleh UNDP bahwa untuk mengukur kesetaraan gender pada akses pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan. Maka dalam penelitian ini diharapkan mampu menganalisis dampak dari desentralisasi fiskal yang tercermin melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan.

Desentralisasi dimaksudkan agar penyediaan barang publik lebih efisien, karena pemerintah daerah dianggap mampu menyediakan barang publik sesuai dengan kondisi wilayah dan permintaan penduduk akan barang publik. Akses pada sumber daya dan pelayanan untuk pembangunan adalah beberapa cara untuk menilai dampak dari desentralisasi fiskal. Pada tingkat daerah kebanyakan layanan yang disediakan adalah *quasi public goods* –barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan dan dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah (Guritno; 2001). Pada kondisi tersebut, penting untuk mengalokasikan sumber daya secara cermat untuk memastikan akses layanan publik pada “*disadvantages group*” yang dimana perempuan termasuk di dalamnya dapat terpenuhi.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2011) berkesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh dalam menurunkan angka kematian bayi dan angka melanjutkan pada tingkat SMP. Dalam penelitian lain Osung Kwon (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam menentukan kesesuaian antara permintaan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah. Uchimura dan Jutting (2007) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan desentralisasi fiskal diperoleh outcome kesehatan yang lebih baik di China.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan tingkat SMA/MA di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan data panel dari lima kabupaten/kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode 2004-2009. Tipe data ini dipilih agar dapat menghitung perbedaan antar kabupaten/kota. Sarys dalam Mudrajat Kuncoro (2004) mengatakan bahwa data panel adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat, yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu.

UNDP dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk mengukur target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dipantau dengan menggunakan indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender). Sedangkan untuk mengukur seberapa besar akses perempuan terhadap fasilitas pendidikan, diukur dengan jumlah penduduk perempuan yang masih sekolah pada usia 16-18 atau lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan (APS).

Metode Analisis

Berdasarkan indikator tersebut penelitian ini menggunakan persamaan estimasi yang mereplikasi dari penelitian dari Uchimura dan Jutting (2009) di China sebagai berikut:

$$AMHPer = a1 + a2DECPAD + a3Y + a4Pop + aJS + u \quad (1)$$

$$AMHPer = b1 + b2DECEXP + b3Y + b4Pop + bJS + u \quad (2)$$

$$APSPer = c1 + c2DECPAD + c3Y + c4Pop + c5JS + u \quad (3)$$

$$APSPer = d1 + d2DECEXP + d3Y + d4Pop + d5JS + u \quad (4)$$

Dimana,

AMHPer = Angka Melek Huruf Perempuan

APSPer = Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di SMA/MA

DECPAD = Derajat desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan

DECEXP = Derajat kemandirian daerah yang diukur dari sisi pengeluaran

Pop = Jumlah penduduk

Y = Regional GDP per kapita (produk domestik regional bruto)

JS = Jumlah Sekolah

u = error terms

Analisa data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengolahan data panel agar didapatkan hasil terbaik. Pengolahan data panel diawali dengan melakukan regresi panel sederhana atau dikenal dengan *Panel Least Square (PLS)*. Selanjutnya Untuk melihat perbedaan intersep dan juga slope baik antar waktu maupun antar ruang digunakan metode lainnya yaitu *fixed effect* dan *random effect*.

Pengujian hipotesis penelitian untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap AMH Perempuan dan APS Perempuan SMA/MA telah diestimasi dengan metode *Panel Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Methods (FEM)*, *Random Effect Methods (REM)*. Dan model terbaik dipilih berdasarkan pada pemenuhan asumsi klasik, dan Uji Hausman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model

Data panel dari kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2004-2009 dalam penelitian ini diestimasi dengan persamaan mereplikasi dari penelitian dari Uchimura dan Jutting (2009) di China. Hasil estimasi pada persamaan awal terdeteksi masalah ketika dilakukan deteksi asumsi klasik, oleh karena itu sebagai langkah perbaikan dilakukan transformasi model dengan mengubah bentuk model menjadi Ln (Log Linear). Setelah dilakukan langkah perbaikan pada model, maka diperoleh persamaan baru dengan *fixed effect model* sebagai berikut:

Model pengaruh desentralisasi fiskal pada sisi pendapatan terhadap AMH Perempuan

$$\text{AMHPer} = 15,6920 - 0,0444 \text{LNDECPAD} + 0,1339 \text{LNY} - 0,8088 \text{LNPOP} - 0,7826 \text{LNJS} \quad (1)$$

t-hitung (4,1032) (-1,5407) (3,2955) (-2,4763) (-2,9639)

F-hitung (111,0797)

 R^2 (0,9769)

Adjusted R-squared 0,9681

Model pengaruh desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran terhadap AMH Perempuan

$$\text{AMHPer} = 16,1542 - 0,0073 \text{LNDECEXP} + 0,1576 \text{LNY} - 0,8798 \text{LNPOP} - 0,7222 \text{LNJS} \quad (2)$$

t-hitung (4,0010) (-0,1550) (3,9736) (-2,5625) (-2,6045)

F-hitung (99,6487)

 R^2 (0,97433)

Adjusted R-squared 0,9645

Model pengaruh desentralisasi fiskal pada sisi pendapatan terhadap APS Perempuan**SMA/MA**

$$\text{APSPer} = -29,7733 + 0,1190 \text{LNDECPAD} - 0,7764 \text{LNY} + 4,3275 \text{LNPOP} - 3,2193 \text{LNJS} \quad (3)$$

t-hitung (-1,56728) (0,8317) (-3,8457) (2,6670) (-2,4543)

F-hitung (7,2783)

 R^2 0,7349

Adjusted R-squared 0,6339

Model pengaruh desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran terhadap APS Perempuan**SMA/MA**

$$\text{APSPer} = -31,7401 + 0,1201 \text{LNDECEXP} - 0,8407 \text{LNY} + 4,5930 \text{LNPOP} - 3,4422 \text{LNJS} \quad (4)$$

t-hitung (-1,6527) (0,5294) (-4,4551) (2,8124) (-2,6098)

F-hitung (7,0904)

 R^2 (0,7298)

Adjusted R-squared 0,7298

Hasil dan Pembahasan Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap AMH Perempuan

Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun dari 2004-2009 di kabupaten/kota provinsi DIY cenderung fluktuatif setiap tahunnya dan tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Daerah yang mempunyai angka melek huruf paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Gunungkidul adalah daerah yang memiliki angka melek huruf paling rendah di antara kabupaten/kota yang lain di provinsi DIY.

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian ini terbukti bahwa variabel desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pengeluaran maupun sisi pendapatan tidak berpengaruh terhadap angka melek huruf perempuan. Variabel kontrol seperti pendapatan per kapita, populasi penduduk dan jumlah sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan.

Dalam hasil analisis persamaan di atas variabel pendapatan per kapita menunjukkan pengaruh positif terhadap angka melek huruf perempuan. Berarti setiap pendapatan per kapita meningkat maka angka melek huruf perempuan akan bertambah. Variabel populasi penduduk dan jumlah sekolah menunjukkan pengaruh negatif terhadap angka melek huruf perempuan, hal ini berarti setiap terjadi pertumbuhan populasi dan jumlah sekolah maka angka melek huruf perempuan akan berkurang.

Hasil dan Pembahasan Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap APS Perempuan SMA/MA

Dari data Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun diketahui angka partisipasi sekolah tertinggi pada tahun 2006 dimiliki Kabupaten Bantul yaitu sebesar 61,08% untuk laki-laki dan 62,99% untuk perempuan. Sedangkan angka partisipasi sekolah paling rendah ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 35,18% untuk laki-laki dan 32,31% untuk perempuan. Di tahun 2008 angka partisipasi sekolah perempuan di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman menunjukkan angka yang lebih besar daripada angka partisipasi sekolah laki-laki. Dan angka partisipasi sekolah tertinggi perempuan ada di Kabupaten Kulon Progo dengan persentase 63,49% dan angka partisipasi sekolah perempuan paling rendah ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 38,08%.

Berdasarkan hasil estimasi persamaan di atas dapat dibuktikan bahwa variabel desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah perempuan di SMA/MA. Dari hasil analisis menggunakan metode Fixed Effect Model menunjukkan bahwa variabel kontrol pendapatan per kapita (Y) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap angka partisipasi sekolah perempuan di SMA/MA. Yakni semakin meningkatnya pendapatan per kapita akan menyebabkan angka partisipasi sekolah perempuan di SMA/MA akan turun.

Variabel populasi penduduk dari hasil analisis persamaan di atas menunjukkan pengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA. Berarti peningkatan angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA lebih disebabkan karena bertambahnya populasi penduduk setiap tahunnya. Pada variabel jumlah sekolah juga menunjukkan tanda signifikan negatif yang berarti apabila jumlah sekolah bertambah maka angka partisipasi sekolah perempuan di SMA/MA akan turun.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil estimasi persamaan dengan *Fixed Effect Methods* mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMA di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur baik melalui sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA. Pertumbuhan angka melek huruf perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Di sisi lain angka partisipasi sekolah perempuan menunjukkan bahwa perempuan pada usia sekolah menengah cenderung turun.

Berdasarkan hasil analisis persamaan dengan *Fixed Effect*, variabel kontrol pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif terhadap angka melek huruf perempuan. Sedangkan variabel kontrol populasi penduduk dan jumlah sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap angka melek huruf perempuan. Dari koefisien yang diperoleh dari analisis persamaan dapat diketahui bahwa populasi penduduk mempunyai pengaruh paling besar terhadap angka melek huruf perempuan. Berdasarkan hasil analisis persamaan dengan *Fixed Effect* untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA menunjukkan bahwa variabel kontrol dalam persamaan yaitu pendapatan per kapita, populasi penduduk dan jumlah sekolah. Variabel pendapatan per kapita dan jumlah sekolah berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA. Sedangkan populasi penduduk menunjukkan pengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah perempuan. Berdasarkan nilai koefisien masing-masing variabel dalam persamaan diketahui bahwa populasi penduduk memiliki pengaruh lebih besar daripada variabel pendapatan per kapita dan jumlah sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi (R^2) untuk persamaan pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi persamaan dan pengeluaran adalah sebesar 0,976914 dan 0,974334, dari nilai koefisien determinasi tersebut terlihat bahwa kemampuan variabel-variabel di dalam model tersebut mampu menjelaskan variasi dari angka melek huruf perempuan sebesar 97,69% dan 97,43%. Untuk persamaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA dari sisi pendapatan dan pengeluaran diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,734938 dan 0,729813. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam model mampu menjelaskan variasi dari angka partisipasi sekolah perempuan sebesar 73,49% pada persamaan desentralisasi dari sisi pendapatan, dan 72,93% untuk persamaan yang menggunakan variabel desentralisasi dari sisi pengeluaran.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah cakupan observasi yang terbatas yaitu enam tahun di lima kabupaten/kota belum mampu merangkum seluruh proses serta dampak desentralisasi fiskal terhadap kesetaraan gender pada sektor pendidikan. Kedua, terbatasnya data yang berdasarkan pilah gender menjadi hambatan untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA.

Atas dasar keterbatasan tersebut untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah observasi dan periode penelitian Kedua, disarankan untuk menggunakan data yang lebih spesifik baik secara pilah gender ataupun anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program pemberdayaan perempuan pada sektor pendidikan.

REFERENSI

- Agustina, Dina. 2010. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Kematian Bayi Dan Angka Melanjutkan SMP/MTs Periode 2007-2009. Skripsi S1 dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005 s/d 2009, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2005, Penerbit BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul.
- Chakraborty, Lekha S. 2010. Determining Gender Equity in Fiscal Federalism: Analytical Issues and Empirical Evidence from India, Levy Economics Institute of Bard College, New York.
- Dinas Pendidikan Provinsi DIY, 2007 s/d 2010, *Data Dan Informasi Pendidikan Tahun 2007/2008*, Yogyakarta.
- Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi DIY, 2010, *Ringkasan Capaian Pembangunan Pendidikan DIY 2004-2008*, Yogyakarta.
- Elhiraika, Adam. 2007. Fiscal Decentralization And Public Service Delivery In South Africa. African Trade Policy Center.
- Firmansyah. 2009. *Modul Regresi Data Panel : Aplikasi dengan Eviews 6.0*. LSKE Undip. Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Guritno, Mangkoesoebroto. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Isdijoso, Brahmantio dan Wibowo, Tri. 2002. *Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah studi kasus: sector pendidikan di kota Surakarta*. Kajian ekonomi dan keuangan Vol.6 No1
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kwon, Osung. 2003. The Effect of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case. Public Budgeting & Finance. Korea.
- Purwantoro, Agus. 2007. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. *Naskah Seminar*.
- Sukirno, Sadono, 2000, Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Alih Bahasa : Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar, Erlangga, Jakarta
- Uchimura, H., Jütting, J. 2009. "Fiscal decentralization, Chinese style: good for health outcomes". *World Development*, 37 (12), 1924-1936.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah.
- Winarto, Wing wahyu,. 2009. "Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews". YKPN. Yogyakarta